

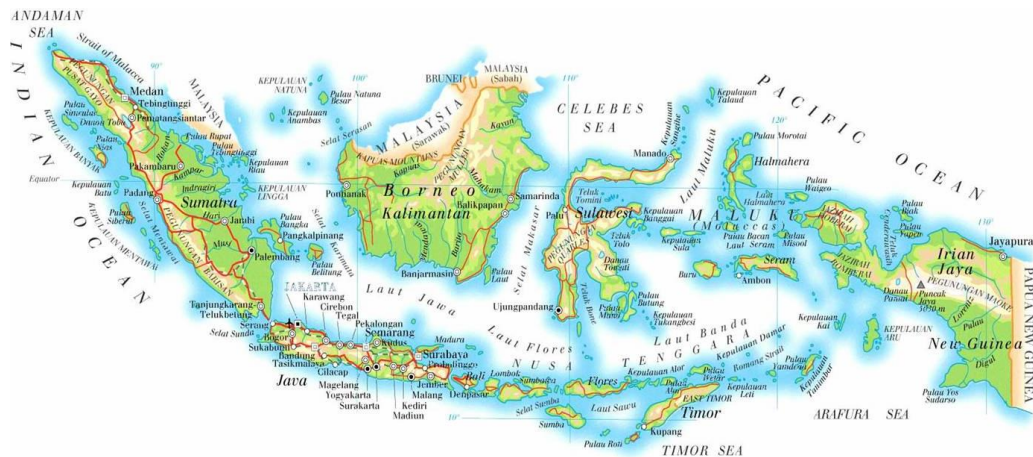
BAB IV

GAMBARAN UMUM

A. Kondisi Geografis

Secara astronomis, Indonesia terletak antara $6^{\circ} 08'$ Lintang Utara dan $11^{\circ} 15'$ Lintang Selatan dan antara $94^{\circ} 45'$ – $141^{\circ} 05'$ Bujur Timur dan dilalui oleh garis ekuator atau garis khatulistiwa yang terletak pada garis lintang 0° .

Berdasarkan letak geografisnya, kepulauan Indonesia berada di antara Benua Asia dan Benua Australia, serta di antara Samudera Hindia dan Samudera Pasifik.



Gambar 4.1
Peta Negara Indonesia

Berdasarkan posisi geografisnya, Negara Indonesia memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut:

- Utara : Negara Malaysia, Singapura, Filipina, dan Laut Cina Selatan
- Selatan : Negara Australia dan Samudra Hindia
- Barat : Samudra Hindia

- Timur : Negara Papua Nugini, Timor Leste, dan Samudera Pasifik

Indonesia memiliki luas daerah sebesar 1.910.931,32 km² dengan total jumlah pulau sebanyak 17.504. Batas ujung barat Nusantara adalah Sabang, batas ujung timur adalah Merauke, batas ujung utara adalah Miangas, dan batas ujung selatan adalah Pulau Rote. Indonesia terletak di kawasan yang beriklim tropis dan berada di belahan timur bumi. Merupakan sebuah Negara yang memiliki 3 daerah waktu, yaitu WIB, WITA dan WIT.

Indonesia terdiri dari 81.626 desa, 7.024 kecamatan, 98 kota, serta 34 provinsi yang terletak di 5 pulau besar dan 4 kepulauan. Adapun 34 provinsi yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut:

- Pulau Sumatera terdiri dari Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, dan Lampung.
- Kepulauan Riau terdiri dari Kepulauan Riau.
- Kepulauan Bangka Belitung terdiri Kepulauan Bangka Belitung.
- Pulau Jawa terdiri dari DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur.
- Kepulauan Nusa Tenggara (Sunda Kecil) terdiri dari Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur.
- Pulau Kalimantan terdiri dari Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara.
- Pulau Sulawesi terdiri Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara.
- Kepulauan Maluku terdiri dari Maluku dan Maluku Utara.

- Pulau Papua terdiri dari Papua dan Papua Barat.

B. Demografi

Penduduk Indonesia pada tahun 2014 mencapai 252.164,8 ribu orang dengan pertumbuhan penduduk dari tahun 2010-2014 sebesar 1,40 persen per tahun atau turun dari penghitungan pertumbuhan tahun 2000-2010 yaitu sebesar 1,49 persen per tahun. Jumlah penduduk masih diperkirakan meningkat sebesar 32,6 juta penduduk dalam kurun waktu 10 tahun (2010-2020). Rasio Jenis Kelamin atau *sex ratio* penduduk menurut provinsi di tahun 2014 adalah sebesar 101,0 penduduk laki-laki dari 100 penduduk perempuan.

Menurut proyeksi BPS tahun 2010-2025 diperkirakan jumlah penduduk sesuai kelompok umur 0-14 tahun adalah 2,7 persen, umur 15-59 tahun adalah 18,9 persen, sedangkan umur 60 tahun keatas adalah 86,8 persen. Terdapat perbedaan dalam pertumbuhan penduduk menurut kelompok umur, dengan pertumbuhan tertinggi pada kelompok lansia yaitu 60 tahun keatas. Pertumbuhan penduduk menurut kelompok umur 0-14 tahun tumbuh negatif 3,6 persen, umur 15-59 tahun tumbuh 25,9 persen, dan umur 60 tahun keatas tumbuh 167,2 persen. Angka harapan hidup masyarakat Indonesia pada tahun 2015 adalah 70,1 tahun atau meningkat dari tahun sebelumnya yaitu 69,1 tahun.

Kepadatan penduduk di Indonesia pada tahun 2014 mencapai 132 orang per km², meningkat dari tahun 2010 yang sebesar 124 orang per km². Kepadatan penduduk tertinggi terjadi di Jakarta dengan jumlah 15.173 penduduk per km², sedangkan kepadatan penduduk terendah terjadi di Kalimantan Utara, Papua Barat

dan Papua yang masing-masing memiliki kepadatan penduduk hanya sebesar 8 penduduk per km², 9 penduduk per km², dan 10 penduduk per km².

C. Gambaran Umum Obyek Penelitian

Obyek dalam penelitian ini adalah 33 provinsi yang ada di Indonesia. Penelitian ini akan menganalisis pengaruh PDRB, belanja daerah dan jumlah penduduk miskin terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Indonesia periode tahun 2010-2014.

1. Perkembangan Indeks Pembangunan Manusia.

Indonesia di yakini sudah memiliki langkah tepat dalam meningkatkan indeks pembangunan manusianya. Indeks pembangunan manusia di setiap provinsi di Indonesia terus meningkat setiap tahunnya dalam kurun 5 tahun terakhir. Hal tersebut dapat di lihat pada tabel berikut :

Tabel 4.1
Indek pembangunan Manusia Indonesia

PROVINSI	TAHUN					Rata-Rata IPM
	2010	2011	2012	2013	2014	
Aceh	67.09	67.45	67.81	68.30	68.81	67.89
Sumatera Utara	67.09	67.34	67.74	68.36	68.87	67.88
Sumatera Barat	67.25	67.81	68.36	68.91	69.36	68.34
Riau	68.65	68.90	69.15	69.91	70.33	69.39
Jambi	65.39	66.14	66.94	67.76	68.24	66.89
Sumatera Selatan	64.44	65.12	65.79	66.16	66.75	65.65
Bengkulu	65.35	65.96	66.61	67.50	68.06	66.70
Lampung	63.71	64.20	64.87	65.73	66.42	64.99
Kep. Bangka Belitung	66.02	66.59	67.21	67.92	68.27	67.20
Kep. Riau	71.13	71.61	72.36	73.02	73.40	72.30
DKI Jakarta	76.31	76.98	77.53	78.08	78.39	77.46
Jawa Barat	66.15	66.67	67.32	68.25	68.80	67.44
Jawa Tengah	66.08	66.64	67.21	68.02	68.78	67.35

Lanjutan Tabel

PROVINSI	TAHUN					Rata-Rata IPM
	2010	2011	2012	2013	2014	
DI. Yogyakarta	75.37	75.93	76.15	76.44	76.81	76.14
Jawa Timur	65.36	66.06	66.74	67.55	68.14	66.77
Banten	67.54	68.22	68.92	69.47	69.89	68.81
Bali	70.10	70.87	71.62	72.09	72.48	71.43
NTB	61.16	62.14	62.98	63.76	64.31	62.87
NTT	59.21	60.24	60.81	61.68	62.26	60.84
Kalimantan Barat	61.97	62.35	63.41	64.30	64.98	63.40
Kalimantan Tengah	65.96	66.38	66.66	67.41	67.77	66.84
Kalimantan Selatan	65.20	65.89	66.68	67.17	67.63	66.51
kalimantan Timur	71.31	72.02	72.62	73.21	73.86	72.60
Sulawesi Utara	67.83	68.31	69.04	69.49	69.96	68.93
Sulawesi Tengah	63.29	64.27	65.00	65.79	66.43	64.96
Sulawesi Selatan	66.00	66.65	67.07	67.92	68.07	67.14
Sulawesi Tenggara	65.99	66.52	67.07	67.55	68.07	67.04
Gorontalo	62.65	63.48	64.16	64.70	65.17	64.03
Sulawesi Barat	59.74	60.63	61.01	61.53	62.24	61.03
Maluku	64.27	64.75	65.43	66.09	66.74	65.46
Maluku Utara	62.79	63.19	63.93	64.78	65.18	63.97
Papua Barat	59.60	59.90	60.30	60.91	61.28	60.40
Papua	54.45	55.01	55.55	56.25	56.75	55.60
NASIONAL	66.53	67.09	67.70	68.37	68.90	67.72

Sumber : Statistik Tahunan Indonesia, BPS 2010-2014

Berdasarkan tabel 4.1 di atas dapat diketahui daerah atau provinsi setiap tahunnya mengalami peningkatan pencapaian IPM. Provinsi yang memiliki rata-rata IPM dengan nilai di atas rata-rata IPM nasional (67,72) adalah DKI Jakarta dengan nilai rata-rata IPM 77,46, D.I Yogyakarta dengan nilai rata-rata IPM 76,14, Kalimantan Timur dengan nilai rata-rata IPM 72,60, Kepulauan Riau dengan nilai rata-rata IPM 72,30, Riau dengan nilai rata-rata IPM 69,39, selanjutnya diikuti dengan provinsi provinsi Sulawesi Utara dengan nilai rata-rata IPM sebesar 68,81, Banten dengan nilai rata-rata IPM 68,81, Sumatera Barat dengan nilai rata-rata IPM 68,34, Aceh dengan nilai rata-rata IPM 67,89, dan yang

terakhir menjadi provinsi yang memiliki nilai rata-rata IPM di atas nilai IPM nasional adalah Sumatera Utara dengan nilai rata-rata IPM sebesar 67,88. Dari 33 bisa diketahui daerah atau provinsi yang memiliki rata-rata IPM dibawah nilai rata-rata IPM nasional adalah 23 provinsi. Dan dari 23 provinsi tersebut yang memiliki nilai rata-rata IPM terendah adalah NTT (60,84), Papua Barat (60,40) dan yang paling rendah Papua (55,60). Hal ini menunjukkan bahwa dari masing-masing provinsi memiliki pencapaian IPM tersendiri tergantung dari program dan kebijakan yang diterapkan pemerintah daerah dalam mendukung peningkatan IPM.

1. Pertumbuhan Produk Domestik Bruto Per Kapita

Dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM) suatu Negara atau daerah, salah satu kesuksesan yang dapat dilihat dari pencapaian IPM tersebut adalah terwujudnya kesejahteraan masyarakatnya. Kesejahteraan masyarakat dapat dilihat dari pendapatan atau PDRB riil per kapita.

Tabel 4.2
PDRB per Kapita menurut Provinsi di Indonesia
atas dasar harga 2010 (Ribu Rupiah)

PROVINSI	TAHUN					Rata-rata pertumbuhan (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	
Aceh	22450.14	22704.80	23099.13	23277.74	23199.49	0.83
Sumatera Utara	25412.07	26711.24	28036.88	29343.04	30482.59	4.65
Sumatera Barat	21584.91	22638.75	23744.01	24844.62	25963.24	4.73
Riau	69701.03	71637.89	72396.34	72300.12	72331.01	0.94
Jambi	29160.16	30856.66	32417.72	34085.91	36088.83	5.47
Sumatera Selatan	25932.00	27157.98	28577.89	29679.57	30627.55	4.25
Bengkulu	16463.68	17282.27	18143.51	18921.19	19631.40	4.50
Lampung	19722.39	20739.31	21794.83	22772.78	23648.76	4.64

Lanjutan Tabel

PROVINSI	TAHUN					Rata-rata pertumbuhan (%)
	2010	2011	2012	2013	2014	
Kep. Bangka Belitung	28906.78	30212.18	31172.42	32086.91	32868.70	3.27
Kep. Riau	65703.34	68024.21	70930.00	73674.03	76753.11	3.96
DKI Jakarta	111528.86	117672.92	123962.38	130110.55	136407.58	5.16
Jawa Barat	20974.94	21976.53	23036.00	24119.24	24961.05	4.45
Jawa Tengah	19209.31	20053.80	20950.62	21852.22	22858.32	4.44
DI. Yogyakarta	18652.97	19387.45	20183.88	21040.36	21873.72	4.06
Jawa Timur	26371.10	27864.26	29508.40	31093.39	32703.80	5.53
Banten	25397.65	26548.94	27716.47	29034.51	29961.85	4.22
Bali	23992.63	25265.96	26689.58	28131.09	29666.48	5.45
NTB	15527.41	14705.77	14276.69	14807.47	15351.54	-0.20
NTT	9316.79	9675.89	10030.98	10398.18	10742.42	3.62
Kalimantan Barat	19510.07	20227.16	21062.22	21969.80	22707.79	3.87
Kalimantan Tengah	25455.05	26588.90	27749.01	29110.59	30220.97	4.38
Kalimantan Selatan	23418.47	24567.52	25547.77	26431.39	27230.80	3.84
kalimantan Timur	116946.31	121196.23	124501.88	132813.96	132628.18	3.22
Sulawesi Utara	22707.79	23812.97	25145.96	26445.92	27804.68	5.19
Sulawesi Tengah	19558.53	21105.70	22724.47	24481.12	25316.32	6.68
Sulawesi Selatan	21306.72	22769.19	24507.17	26086.94	27760.85	6.84
Sulawesi Tenggara	21573.11	23338.07	25489.79	26817.47	27898.88	6.66
Gorontalo	14811.95	15687.65	16650.27	17640.56	18627.37	5.90
Sulawesi Barat	14755.47	16023.44	17169.06	18010.31	19211.14	6.83
Maluku	11951.84	12477.19	13129.11	13574.04	14230.08	4.46
Maluku Utara	14361.54	14994.63	15691.01	16334.50	16872.31	4.11
Papua Barat	54049.32	54539.86	55047.84	57595.40	59156.84	2.29
Papua	38785.11	36383.24	36280.03	38393.76	38891.99	0.16
Jumlah 33 provinsi	28778.17	30112.37	31519.93	32874.76	34127.72	4.36

Sumber : Statistik Tahunan Indonesia, BPS 2010-2014

Berdasarkan tabel 4.2 di atas menunjukkan pertumbuhan PDRB provinsi atau daerah. Jumlah PDRB dari 33 provinsi menunjukkan peningkatan setiap tahunnya (2010-2014). Dengan nilai jumlah dari tahun 2010 sebesar 28,77 juta sampai pada tahun 2014 naik menjadi 34,12 juta. Setiap provinsi juga memiliki nilai PDRB yang berbeda-beda. Provinsi yang memiliki nilai PDRB per kapita tertinggi diperoleh provinsi Kalimantan Timur dan DKI Jakarta dengan PDRB

per kapita lebih dari 100 juta setiap tahunnya dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi 3,22% dan 5,16%. Provinsi Riau, Kepulauan Riau, dan Papua Barat memiliki nilai PDRB sedang yaitu dengan nilai lebih dari 50 juta setiap tahunnya. Sedangkan provinsi yang memiliki nilai PDRB per kapita paling rendah adalah Provinsi NTT dengan PDRB per kapita hanya kurang dari 15 juta setiap tahunnya, tetapi pertumbuhan PDRB per kapita cukup menunjukkan progress yang positif dengan rata-rata pertumbuhan 3,62%.

2. Perkembangan Belanja Daerah

Pengeluaran Pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal (Sadono Sukirno, 2000), yaitu suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah setiap tahunnya, yang tercermin dalam dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk nasional dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) untuk daerah atau regional.

Tabel 4.3
Realisasi Belanja Pemerintah Daerah Provinsi Indonesia Menurut
Jenis Belanja (Milliar Rupiah) 2010-2014

No	Jenis Belanja	2010	2011	2012	2013	2014
A.	Belanja Tidak Langsung	53.152	66.590	101.469	109.748	123.758
1.	Belanja Pegawai	20.693	24.862	27.209	28.593	30.925
2.	Belanja Bunga	9	15	26	36	45
3.	Belanja Subsidi	65	40	27	26	32
4.	Belanja Hibah	4.428	7.369	33.609	35.964	33.018
5.	Belanja Bantuan Sosial	3.627	4.008	1.402	2.267	1.614
6.	Belanja Bagi Hasil	13.628	17.301	20.956	22.612	31.834

Lanjutan Tabel

No	Jenis Belanja	2010	2011	2012	2013	2014
7.	Belanja Bantuan Keuangan	10.552	12.824	18.004	20.048	26.086
8.	Pengeluaran Tidak Terduga	150	191	236	202	168
B.	Belanja Langsung	59.001	65.627	77.977	94.001	95.577
1.	Belanja Pegawai	6.670	5.638	6.637	7.874	7.216
2.	Belanja Barang dan Jasa	26.992	33.657	41.370	49.557	51.521
3.	Belanja Modal	25.339	26.333	29.970	36.569	36.839
JUMLAH/TOTAL		112.153	132.217	203.749	257.009	219.335

Sumber: BPS, Statistik Keuangan Pemerintahan Provinsi

Tabel di atas 4.3 menunjukkan perkembangan realisasi belanja pemerintah dari tahun 2010 sampai dengan tahun 2014. dilihat dari struktur belanja secara keseluruhan, dapat dilihat bahwa komponen belanja terbesar masih didominasi oleh belanja pegawai, dalam hal ini gabungan dari belanja pegawai langsung dan tidak langsung. pada tahun 2010 belanja pegawai tercatat sebesar 27.636 miliar rupiah atau 24,40 persen terhadap total belanja. Namun pada tahun 2011, komponen belanja terbesar adalah belanja barang dan jasa (komponen belanja langsung), karena belanja pegawai pada tahun tersebut hanya 30.464 miliar rupiah lebih rendah dibandingkan belanja barang dan jasa sebesar 33.657 miliar rupiah. Sedangkan pada tahun 2012 belanja pegawai diperkirakan terus meningkat sebesar 16,65 persen dibanding tahun 2011. Komponen belanja berikutnya yang cukup dominan adalah belanja barang dan jasa. Pada tahun 2010-2011, belanja tersebut tercatat sebesar 26.992 miliar rupiah dan 33.657 miliar rupiah. pada tahun 2012 belanja barang dan jasa di anggarakan sebesar 42.093 miliar rupiah lebih tinggi dari realisasi tahun 2011. Belanja modal juga nilai yang

cukup besar yaitu 25.339 miliar rupiah pada tahun 2010, 26.333 miliar rupiah pada tahun 2011, 29.970 miliar rupiah pada tahun 2012, 36.569 miliar rupiah pada tahun 2013. Pada tahun 2014 belanja modal dianggarkan sebesar 36.839 miliar rupiah.

3. Jumlah Penduduk Miskin.

Kemiskinan adalah keadaan di mana terjadi ketidak mampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan dan kesehatan. jumlah penduduk miskin turut berpengaruh terhadap pencapaian indeks pembangunan manusia. Tinggi jumlah penduduk miskin akan menghambat peningkatan kualitas sumber daya manusia di suatu Negara atau daerah.

Tabel 4.4
Perkembangan Jumlah Penduduk Miskin menurut Provinsi (2010-2014)
Ribu Jiwa

PROVINSI	TAHUN					Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	2014	
Aceh	898.40	900.20	876.60	856.90	837.42	873.90
Sumatera Utara	1478.10	1421.40	1378.30	1416.40	1360.60	1410.96
Sumatera Barat	458.20	441.80	397.90	384.10	354.74	407.35
Riau	558.30	472.50	481.30	511.50	498.28	504.38
Jambi	260.00	251.80	270.20	277.70	281.75	268.29
Sumatera Selatan	1105.40	1061.90	1041.80	1104.60	1085.80	1079.90
Bengkulu	281.20	303.40	310.60	323.50	316.50	307.04
Lampung	1351.70	1277.90	1219.00	1144.80	1143.94	1227.47
Kep. Bangka Belitung	92.30	65.60	70.10	69.40	67.23	72.93
Kep. Riau	138.20	122.50	131.30	119.10	124.17	127.05
DKI Jakarta	388.70	355.20	366.70	371.70	412.79	379.02
Jawa Barat	4716.90	4650.80	4421.30	4375.20	4238.96	4480.63
Jawa Tengah	5218.70	5256.00	4863.50	4811.30	4561.82	4942.26
DI. Yogyakarta	540.50	564.30	562.10	541.90	532.58	548.28
Jawa Timur	5579.40	5227.20	4960.20	4893.00	4782.22	5088.40

Lanjutan Tabel

PROVINSI	TAHUN					Rata-rata
	2010	2011	2012	2013	2014	
Banten	751.00	690.90	648.10	677.50	649.19	683.34
Bali	221.60	183.10	160.90	182.80	195.72	188.82
NTB	972.30	896.20	828.20	815.50	816.62	865.76
NTT	1021.60	986.50	1000.10	1006.90	991.88	1001.40
Kalimantan Barat	400.40	376.10	355.90	407.30	381.91	384.32
Kalimantan Tengah	166.00	150.00	144.90	149.40	148.82	151.82
Kalimantan Selatan	205.40	198.60	189.30	184.30	189.49	193.42
kalimantan Timur	285.70	247.10	246.10	248.70	252.68	256.06
Sulawesi Utara	217.80	194.70	177.40	201.10	197.56	197.71
Sulawesi Tengah	455.60	432.10	409.50	400.40	387.06	416.93
Sulawesi Selatan	917.40	835.50	805.80	863.20	806.35	845.65
Sulawesi Tenggara	351.30	334.30	304.30	330.80	314.09	326.96
Gorontalo	172.60	192.40	187.60	198.50	195.10	189.24
Sulawesi Barat	171.10	163.20	160.50	151.70	154.96	160.29
Maluku	389.50	356.40	338.90	315.20	307.02	341.40
Maluku Utara	101.80	107.00	88.20	85.60	84.79	93.48
Papua Barat	217.40	227.10	223.20	226.20	225.46	223.87
Papua	918.20	946.60	976.30	960.60	864.11	933.16
NASIONAL	31002.70	29890.30	28596.10	28606.80	27761.61	29171.50

Sumber : Statistik Tahunan Indonesia, BPS 2010-2014

Tabel 4.4 di atas menunjukkan perkembangan jumlah penduduk miskin per provinsi di Indonesia. Untuk skala nasional sendiri, perkembangan jumlah penduduk miskin mengalami penurunan setiap tahunnya (2010-2014) sebesar 2,17 persen. sedangkan rata-rata jumlah penduduk miskin skala nasional mencapai 29.171,50 ribu jiwa. Jumlah tersebut diperoleh dari jumlah rata-rata penduduk miskin per provinsi. Daerah atau provinsi yang memiliki sumbangan paling besar terhadap jumlah penduduk miskin nasional adalah provinsi Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan rata-rata penduduk miskin sebesar 4.480,63 ribu jiwa, 4.942,26 ribu jiwa dan 5.008,40 jiwa. dari 33 provinsi, provinsi tersebut memiliki penduduk miskin lebih dari 1.000 dibandingkan provinsi lainnya.

Sedangkan provinsi yang memiliki sumbangan terkecil terhadap penduduk miskin nasional adalah Kepulauan Bangka Belitung dengan rata-rata penduduk miskin 72,93 ribu jiwa dan provinsi Maluku Utara dengan rata-rata penduduk miskin 93,48 ribu jiwa. Dengan menurunnya jumlah penduduk miskin setiap tahunnya per provinsi maka dapat dilihat sejauh mana keberhasilan pembangunan dengan tingkat kesejahteraan dan kualitas sumber daya manusianya.